BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN, PEMBAGIAN BESARAN ,DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA GAMPONG TAHUN 2026 DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tata cara penetapan dan pembagian besaran serta petunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Gampong Tahun 2026 dalam suatu Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Tata Cara Penetapan, Pembagian Besaran dan Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong Tahun 2025 dalam Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7136);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 181);
18. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 4);
19. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 03);
20. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN, PEMBAGIAN BESARAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA GAMPONG TAHUN 2026 DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pada pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
7. Pemerintahan gampong adalah keuchik dan tuha peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
8. Pemerintah gampong, adalah keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
9. Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Sekretaris Gampong adalah pembantu keuchik/kepala gampong dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dalam pemberdayaan masyarakat yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau akan ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati.
11. Tuha peut gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
12. Rencana Kerja Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah hasil musyawarah masyarakat gampong tentang bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah Dokumen Perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.

14. Qanun Gampong adalah peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang dibuat oleh Tuha Peuet Gampong bersama Keuchik.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
16. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
18. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut.
19. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan gampong.
20. Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong adalah sejumlah uang yang dibayarkan pada Keuchik dan Perangkat Gampong atas jabatan yang diembannya dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang bersumber dari ADG.
21. Pembinaan adalah pemberian pedoman standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gampong.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud diberikannya ADG adalah untuk membiayai:
   a. penyelenggaraan pemerintahan gampong;
   b. pelaksanaan pembangunan gampong;
   c. pembinaan kemasyarakatan gampong; dan
   d. pemberdayaan masyarakat gampong.

(2) Tujuan diberikannya ADG adalah:
   a. mewujudkan pemerintahan gampong yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung-jawab;
   b. meningkatkan nilai-nilai keagamaan, adat dan sosial budaya dalam rangka penguatan pemerintahan gampong;

c. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
d. memajukan perekonomian masyarakat gampong serta pemberdayaan masyarakat gampong;
e. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat gampong guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
f. mengefektifkan perencanaan pembangunan gampong dengan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat gampong untuk pengembangan potensi dan aset gampong guna kesejahteraan bersama;
g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat gampong guna mewujudkan masyarakat gampong yang mampu memelihara kesatuan sosial;
h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan gampong; dan
i. meningkatkan pendapatan gampong dan ekonomi masyarakat gampong melalui BUMG.

BAB III
SUMBER PENDANAAN

Pasal 3

Pendanaan ADG bersumber dari APBK.

BAB IV
PENENTUAN BESARAN

Pasal 4

(1) ADG merupakan bagian dana Transfer Umum yang diterima Kabupaten.

(2) ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari DTU (dana alokasi umum dan DBH) yang diterima oleh Kabupaten Aceh Selatan tidak termasuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam dalam ketentuan perundang-undangan.

(3) Besaran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Rp. 59.305.597.600,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Dana Alokasi Umum Formula sebesar Rp 58.850.787.900,00; dan
b. Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 454.809.700,00

(4) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan jumlah kebutuhan penghasilan tetap keuchik dan perangkat gampong, Tunjangan Penghasilan Keuchik dan Perangkat Gampong, jumlah Tuha Peuet Gampong, dan Biaya Operasional Tuha Peut Gampong.

(5) Besaran ADG untuk masing-masing gampong dalam Kabupaten Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERSYARATAN PENGAJUAN

Pasal 5

(1) Persyaratan pengajuan permohonan penyaluran ADG sebagai berikut:
   a. telah diverifikasi dan direkomendasikan layak untuk mengajukan permohonan penyaluran oleh Tim Fasilitasi dengan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
      a. Qanun APBG Tahun 2026 telah ditetapkan, serta telah dilakukan evaluasi oleh Bupati dan / atau didelegasikan kepada Camat;
      b. semua pekerjaan/kegiatan tahun dan atau tahap sebelumnya telah dilaksanakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      c. telah melakukan pemungutan dan penyetoran PBB berdasarkan target kinerja sesuai ketentuan, untuk tahun sebelumnya dan/atau tahun berkenaan; dan
      d. mematuhi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah.
   b. melengkapi/mencukupi dokumen sebagai berikut:
      1. permohonan penyaluran dari Keuchik/Pj. Keuchik kepada Bupati;
      2. fotokopi Qanun RPJMG atau Qanun RPJMG Perubahan (untuk pengajuan tahap I);
      3. fotokopi Qanun RKPG Tahun 2026 (untuk pengajuan tahap I);
      4. fotokopi Qanun APBG Tahun 2026 (untuk pengajuan tahap I) dan fotokopi Qanun Perubahan APBG Tahun 2026 (untuk tahap II/akhir bila ada perubahan APBG);
      5. fotokopi Surat Keputusan (SK) Penunjukan Bank sebagai Penyimpan dan Pencairan (dilegalisir Keuchik/Pj. Keuchik dan mengetahui Camat);
      6. fotokopi print rekening koran kas gampong (dilegalisir Keuchik/Pj. Keuchik dan dan mengetahui Camat);
      7. fotokopi Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Keuchik (dilegalisir Camat);
      8. fotokopi Surat Keputusan (SK) Bendahara Gampong (dilegalisir Keuchik/Pj.Keuchik dan mengetahui Camat);
      9. fotokopi KTP Keuchik/Pj. Keuchik (dilegalisir Camat);
      10. fotokopi KTP Bendahara Gampong (dilegalisir Camat);
      11. fotokopi NPWP Gampong (dilegalisir Keuchik/Pj. Keuchik dan mengetahui Camat);
      12. pakta integritas bermeterai cukup; dan

13. kwitansi penerimaan bermeterai cukup.

(2) Pengecualian dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dapat dilakukan dengan persetujuan Camat.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

(1) ADG dianggarkan setiap tahun dalam APBK.

(2) Bupati menetapkan besaran sementara ADG untuk masing-masing gampong setiap awal tahun anggaran.

(3) Pemerintah Gampong membuka rekening kas gampong pada Bank diwilayahnya atau yang terdekat.

(4) Keuchik mengajukan permohonan penyaluran ADG kepada Bupati melalui Camat.

(5) Camat meneruskan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi.

(6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten meneruskan berkas permohonan penyaluran berikut lampirannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

(7) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten menyalurkan ADG dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.

(8) Penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank 100%, dengan 3 (tiga) tahap yaitu:
   a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADG setiap Gampong paling cepat bulan Pebruari 2026, dan disalurkan setiap bulannya sesuai dengan Gampong yang layak salur;
   b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADG setiap Gampong paling cepat bulan Mei 2026, dan disalurkan setiap bulannya sesuai dengan Gampong yang layak salur; dan
   c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu ADG setiap Gampong paling cepat bulan Oktober 2026, dan disalurkan setiap bulannya sesuai dengan Gampong yang layak salur.

(9) Penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat digabungkan bila bulan sebelumnya tidak terealisasi.

(10) Dalam hal terjadi selisih perhitungan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati berdasarkan perhitungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.

(11) Apabila terjadi kekurangan atau kelebihan penyaluran ADG untuk Gampong pada akhir tahun anggaran

berjalan maka akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PRIORITAS PENGGUNAAN

Pasal 7

(1) ADG diprioritaskan untuk biaya belanja:
   a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, antara lain:
      1. penghasilan tetap Keuchik Non PNS, Perangkat Gampong Non PNS secara proporsional;
      2. tunjangan Keuchik PNS dan Pj. Keuchik;
      3. tunjangan Sekretaris Gampong PNS;
      4. operasional Pemerintah Gampong;
      5. tunjangan dan uang sidang Tuha Peut Gampong secara proporsional;
      6. operasional Tuha Peut Gampong;
      7. insentif dusun atau nama lain;
      8. Tunjangan Tgk.Gampong/Imeum Meunasah.
   b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong.

(2) Prioritas ADG sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

(3) Penggunaan ADG mengacu pada RPJMG dan RKPG Tahun 2026.

BAB VIII
PENGELOLAAN

Pasal 8

(1) Pengelolaan keuangan gampong dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(2) ADG merupakan bagian dari sumber pendapatan gampong.

(3) Besaran ADG dituangkan dalam Qanun Gampong tentang APBG Tahun 2026.

(4) Keuchik atau Penjabat Keuchik sebagai pemegang kekuasaan keuangan gampong bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan ADG.

Pasal 9

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBG harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Gampong atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas gampong yang mengakibatkan beban APBG tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Qanun Gampong tentang APBG ditetapkan menjadi Qanun Gampong, kecuali apabila mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan

pengeluaran kas gampong dimaksud bilamana Qanun Gampong tentang APBG belum mendapat pengesahan.

(4) Bendahara Gampong sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kegiatan yang dibiayai dengan ADG harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan ADG menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

(2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Gampong.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 12

(1) Keuchik dengan difasilitasi oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADG kepada Bupati melalui Tim Koordinasi.

(2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADG adalah sebagai berikut :
   a. laporan berkala, memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja disampaikan paling lambat pada waktu pengajuan permohonan penyaluran tahap berikutnya; dan
   b. laporan akhir tahun penggunaan ADG memuat, pelaksanaan kegiatan, masalah yang dihadapi, dan penyelesaiannya, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(3) Dalam hal Keuchik tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran ADG.

(4) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBG dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran dan/atau tahap sebelumnya.

(5) Bupati dapat mengurangi penyaluran dana gampong dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

(6) SiLPA ADG yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa sisa ADG yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADG yang diterima Gampong.

(7) Penggunaan ADG yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.

(8) Pengurangan ADG dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Pertanggungjawaban ADG terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBG.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Pemerintah Kabupaten wajib membina, mengawasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ADG.

(2) Pembinaan, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Tim Fasilitasi.

(3) Pengawasan dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Tim Koordinasi Kabuapaten sebagaimana dimaksud ayat (1) yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi ADG;
   b. melakukan koordinasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau pihak lain;
      melakukan kegiatan koordinasi pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADG; dan
   c. memberikan laporan kepada Bupati.

Pasal 16

(1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran ADG;
   b. melakukan fasilitasi pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan ADG;
   c. melakukan fasilitasi pembinaan administrasi keuangan gampong;
   d. melakukan fasilitasi pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi; dan
   e. memberikan laporan kepada Tim Koordinasi.

Pasal 17

(1) Keuchik dapat membentuk Tim/Panitia Pelaksana/ Pengelola pada tiap kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong.

(2) Tim/Panitia Pelaksana/Pengelola Kegiatan ditetapkan dengan keputusan Keuchik.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 9 Maret 2026 M
Ramadhan 1447 H

BUPATI ACEH SELATAN,

MIRWAN MS

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 9 Maret 2026 M
Ramadhan 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

DIVA SAMUDRA PUTRA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2026 NOMOR ....

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG TATA CARA PENETAPAN, PEMBAGIAN BESARAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA GAMPONG TAHUN 2026 DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN.

RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG
DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Alokasi Dana Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	11.01.01.2001	KEUDE BAKONGAN	BAKONGAN	234.559.120
2	11.01.01.2002	UJONG MANGKI	BAKONGAN	227.959.120
3	11.01.01.2003	UJONG PADANG	BAKONGAN	227.959.120
4	11.01.01.2004	GAMPONG DRIEN	BAKONGAN	227.959.120
5	11.01.01.2015	DARUL IKHSAN	BAKONGAN	234.559.120
6	11.01.01.2016	PADANG BEURAHAN	BAKONGAN	227.959.120
7	11.01.01.2017	GAMPONG BARO	BAKONGAN	227.959.120
8	11.01.02.2001	FAJAR HARAPAN	KLUET UTARA	227.959.120
9	11.01.02.2002	KRUENG BATEE	KLUET UTARA	250.631.032
10	11.01.02.2003	PASI KUALA ASAHAN	KLUET UTARA	227.959.120
11	11.01.02.2004	GUNONG PULO	KLUET UTARA	227.959.120
12	11.01.02.2005	PULO IE I	KLUET UTARA	234.559.120
13	11.01.02.2006	JAMBO MANYANG	KLUET UTARA	234.559.120
14	11.01.02.2007	SIMPANG EMPAT	KLUET UTARA	234.559.120
15	11.01.02.2008	LIMAUPURUT	KLUET UTARA	211.887.208
16	11.01.02.2009	PULO KAMBING	KLUET UTARA	234.559.120
17	11.01.02.2010	KAMPUNG PAYA	KLUET UTARA	219.087.208
18	11.01.02.2011	KRUENG BATU	KLUET UTARA	244.031.032
19	11.01.02.2012	KRUENG KLUET	KLUET UTARA	212.487.208
20	11.01.02.2013	ALURMAS	KLUET UTARA	234.559.120
21	11.01.02.2014	KAMPUNG TINGGI	KLUET UTARA	205.887.208
22	11.01.02.2015	RUAK	KLUET UTARA	234.559.120
23	11.01.02.2016	SIMPANG LHEE	KLUET UTARA	227.959.120
24	11.01.02.2017	SUAQ GERINGGENG	KLUET UTARA	205.887.208
25	11.01.02.2018	PASI KUALA BA'U	KLUET UTARA	234.559.120
26	11.01.02.2019	KEDAI PADANG	KLUET UTARA	227.959.120
27	11.01.02.2020	KOTAFAJAR	KLUET UTARA	289.374.856
28	11.01.02.2021	GUNUNG PUDUNG	KLUET UTARA	227.959.120
29	11.01.03.2018	SUAQ BAKUNG	KLUET SELATAN	228.559.120
30	11.01.03.2002	RANTAU BINUANG	KLUET SELATAN	227.959.120
31	11.01.03.2003	BARAT DAYA	KLUET SELATAN	227.959.120
32	11.01.03.2004	SIALANG	KLUET SELATAN	227.959.120
33	11.01.03.2005	KAPEH	KLUET SELATAN	205.887.208
34	11.01.03.2006	PULO IE	KLUET SELATAN	205.887.208
35	11.01.03.2007	KEDAI RUNDING	KLUET SELATAN	273.302.944
36	11.01.03.2008	KEDAI KANDANG	KLUET SELATAN	227.959.120
37	11.01.03.2009	GAMPONG LUAR	KLUET SELATAN	227.959.120
38	11.01.03.2010	UJUNG	KLUET SELATAN	227.959.120
39	11.01.03.2011	JUA	KLUET SELATAN	205.887.208
40	11.01.03.2012	PASI MEURAPAT	KLUET SELATAN	227.959.120

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Alokasi Dana Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
41	11.01.03.2013	UJUNG PASIR	KLUET SELATAN	205.887.208
42	11.01.03.2014	GEULUMBUK	KLUET SELATAN	234.559.120
43	11.01.03.2015	PASIE LEMBANG	KLUET SELATAN	234.559.120
44	11.01.03.2016	UJUNG PADANG	KLUET SELATAN	205.887.208
45	11.01.03.2017	INDRA DAMAI	KLUET SELATAN	251.231.032
46	11.01.04.2001	BAKAU HULU	LABUHANHAJI	228.559.120
47	11.01.04.2002	PADANG BAKAU	LABUHANHAJI	244.631.032
48	11.01.04.2003	MANGGIS HARAPAN	LABUHANHAJI	234.559.120
49	11.01.04.2004	PASAR LAMA	LABUHANHAJI	250.631.032
50	11.01.04.2005	APHA	LABUHANHAJI	227.959.120
51	11.01.04.2006	UJUNG BATU	LABUHANHAJI	205.887.208
52	11.01.04.2007	PAWOH	LABUHANHAJI	266.702.944
53	11.01.04.2008	DALAM	LABUHANHAJI	211.887.208
54	11.01.04.2009	KOTA PALAK	LABUHANHAJI	227.959.120
55	11.01.04.2010	CACANG	LABUHANHAJI	244.031.032
56	11.01.04.2011	TENGAH PISANG	LABUHANHAJI	227.959.120
57	11.01.04.2012	PISANG	LABUHANHAJI	228.559.120
58	11.01.04.2013	HULU PISANG	LABUHANHAJI	212.487.208
59	11.01.04.2014	TENGAH BARU	LABUHANHAJI	250.631.032
60	11.01.04.2015	LEMBAH BARU	LABUHANHAJI	211.887.208
61	11.01.04.2016	PADANG BARU	LABUHANHAJI	211.887.208
62	11.01.05.2024	KUTA BULOH II	MEUKEK	227.959.120
63	11.01.05.2002	KUTA BULOH I	MEUKEK	250.631.032
64	11.01.05.2003	IE DINGEN	MEUKEK	266.702.944
65	11.01.05.2004	DRIEN JALO	MEUKEK	211.887.208
66	11.01.05.2005	JAMBO PAPEUN	MEUKEK	289.374.856
67	11.01.05.2006	BUKIT MEUH	MEUKEK	189.815.296
68	11.01.05.2007	BLANG KUALA	MEUKEK	250.631.032
69	11.01.05.2008	ROT TEUNGOH	MEUKEK	250.631.032
70	11.01.05.2009	ALUE BARO	MEUKEK	227.959.120
71	11.01.05.2010	LADANG TUHA	MEUKEK	211.887.208
72	11.01.05.2011	LHOK MAMPLAM	MEUKEK	227.959.120
73	11.01.05.2012	ARUN TUNGGAI	MEUKEK	228.559.120
74	11.01.05.2013	BLANG TEUNGOH	MEUKEK	211.887.208
75	11.01.05.2014	BLANG BLADEH	MEUKEK	241.159.120
76	11.01.05.2015	IE BUBOH	MEUKEK	211.887.208
77	11.01.05.2016	KEUDE MEUKEK	MEUKEK	205.887.208
78	11.01.05.2017	KUTA BARO	MEUKEK	211.887.208
79	11.01.05.2018	TANJUNG HARAPAN	MEUKEK	189.815.296
80	11.01.05.2019	LABUHAN TAROK	MEUKEK	241.159.120
81	11.01.05.2020	LHOK AMAN	MEUKEK	234.559.120
82	11.01.05.2021	ALUE MEUTUAH	MEUKEK	227.959.120
83	11.01.05.2022	LADANG BARO	MEUKEK	211.887.208
84	11.01.05.2023	LABUHAN TAROK II	MEUKEK	227.959.120
85	11.01.06.2001	DALAM	SAMADUA	227.959.120
86	11.01.06.2002	SUBARANG	SAMADUA	227.959.120
87	11.01.06.2003	KOTA BARU	SAMADUA	227.959.120
88	11.01.06.2004	GUNUNG KETEK	SAMADUA	227.959.120
89	11.01.06.2005	LADANG PANTON LUAS	SAMADUA	227.959.120
90	11.01.06.2006	MADAT	SAMADUA	227.959.120
91	11.01.06.2007	ALUR SUMERAH	SAMADUA	185.767.528

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Alokasi Dana Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
92	11.01.06.2008	TENGAH	SAMADUA	227.959.120
93	11.01.06.2009	GUNUNG CUT	SAMADUA	227.959.120
94	11.01.06.2010	ALUR PINANG	SAMADUA	227.959.120
95	11.01.06.2011	KUTA BLANG	SAMADUA	244.031.032
96	11.01.06.2012	BATEE TUNGGAI	SAMADUA	227.959.120
97	11.01.06.2013	UJUNG TANAH	SAMADUA	227.959.120
98	11.01.06.2014	UJUNG KAMPUNG	SAMADUA	227.959.120
99	11.01.06.2015	JILATANG	SAMADUA	205.887.208
100	11.01.06.2016	LUAR	SAMADUA	227.959.120
101	11.01.06.2017	LUBUK LAYU	SAMADUA	227.959.120
102	11.01.06.2018	SUAQ HULU	SAMADUA	227.959.120
103	11.01.06.2019	TAMPANG	SAMADUA	227.959.120
104	11.01.06.2020	PAYONAN GADANG	SAMADUA	227.959.120
105	11.01.06.2021	GADANG	SAMADUA	227.959.120
106	11.01.06.2022	BARU	SAMADUA	205.887.208
107	11.01.06.2023	LADANG KASIK PUTIH	SAMADUA	205.887.208
108	11.01.06.2024	AIR SIALANG HILIR	SAMADUA	227.959.120
109	11.01.06.2025	AIR SIALANG HULU	SAMADUA	227.959.120
110	11.01.06.2026	AIR SIALANG TENGAH	SAMADUA	227.959.120
111	11.01.06.2027	BALAI	SAMADUA	211.887.208
112	11.01.06.2028	ARAFAH	SAMADUA	227.959.120
113	11.01.07.2001	SIKULAT	SAWANG	227.959.120
114	11.01.07.2002	SAWANG I	SAWANG	227.959.120
115	11.01.07.2003	MEULIGO	SAWANG	227.959.120
116	11.01.07.2004	LHOK PAWOH	SAWANG	257.231.032
117	11.01.07.2005	SAWANG II	SAWANG	205.887.208
118	11.01.07.2006	UJUNG KARANG	SAWANG	227.959.120
119	11.01.07.2007	TRIENG MEUDURO BAROH	SAWANG	234.559.120
120	11.01.07.2008	TRIENG MEUDURO TUNONG	SAWANG	234.559.120
121	11.01.07.2009	PANTON LUAS	SAWANG	212.487.208
122	11.01.07.2010	SIMPANG TIGA	SAWANG	212.487.208
123	11.01.07.2011	KUTA BARO	SAWANG	227.959.120
124	11.01.07.2012	BLANG GELINGGANG	SAWANG	227.959.120
125	11.01.07.2013	MUTIARA	SAWANG	212.487.208
126	11.01.07.2014	UJUNG PADANG	SAWANG	234.559.120
127	11.01.07.2015	SAWANG BA'U	SAWANG	212.487.208
128	11.01.08.2017	LHOK KEUTAPANG	TAPAKTUAN	241.159.120
129	11.01.08.2018	HILIR	TAPAKTUAN	273.302.944
130	11.01.08.2019	PADANG	TAPAKTUAN	227.959.120
131	11.01.08.2020	HULU	TAPAKTUAN	212.487.208
132	11.01.08.2021	JAMBO APHA	TAPAKTUAN	212.487.208
133	11.01.08.2022	TEPI AIR	TAPAKTUAN	211.887.208
134	11.01.08.2023	PASAR	TAPAKTUAN	227.959.120
135	11.01.08.2024	LHOK BENGKUANG	TAPAKTUAN	235.159.120
136	11.01.08.2009	PANTON LUAS	TAPAKTUAN	211.887.208
137	11.01.08.2010	GUNUNG KERAMBIL	TAPAKTUAN	234.559.120
138	11.01.08.2011	AIR BERUDANG	TAPAKTUAN	273.302.944
139	11.01.08.2012	BATU ITAM	TAPAKTUAN	241.159.120
140	11.01.08.2013	PANJUPIAN	TAPAKTUAN	227.959.120
141	11.01.08.2014	LHOK RUKAM	TAPAKTUAN	227.959.120
142	11.01.08.2015	AIR PINANG	TAPAKTUAN	234.559.120

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Alokasi Dana Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
143	11.01.08.2016	LHOK BENGKUANG TIMUR	TAPAKTUAN	241.159.120
144	11.01.09.2001	KEUDE TRUMON	TRUMON	228.559.120
145	11.01.09.2002	UJONG TANOH	TRUMON	227.959.120
146	11.01.09.2003	SIGLENG	TRUMON	205.887.208
147	11.01.09.2004	IE MEUDAMA	TRUMON	227.959.120
148	11.01.09.2005	TEUPIN TINGGI	TRUMON	205.887.208
149	11.01.09.2006	KUTA BARO	TRUMON	205.887.208
150	11.01.09.2007	PANTON BILIE	TRUMON	227.959.120
151	11.01.09.2012	KUTA PADANG	TRUMON	205.887.208
152	11.01.09.2013	RAKET	TRUMON	205.887.208
153	11.01.09.2014	GAMPONG TEUNGOH	TRUMON	227.959.120
154	11.01.09.2015	SENEUBOK JAYA	TRUMON	205.887.208
155	11.01.09.2016	PADANG HARAPAN	TRUMON	227.959.120
156	11.01.10.2001	LADANG TEUNGOH	PASIE RAJA	227.959.120
157	11.01.10.2002	PUCOK KRUENG	PASIE RAJA	227.959.120
158	11.01.10.2003	SILOLO	PASIE RAJA	250.631.032
159	11.01.10.2004	KAMPUNG BARU	PASIE RAJA	227.959.120
160	11.01.10.2005	PANTON BILI	PASIE RAJA	227.959.120
161	11.01.10.2006	PAYA ATEUK	PASIE RAJA	250.631.032
162	11.01.10.2007	LADANG TUHA	PASIE RAJA	234.559.120
163	11.01.10.2008	MATA IE	PASIE RAJA	227.959.120
164	11.01.10.2009	UJONG BATEE	PASIE RAJA	227.959.120
165	11.01.10.2010	LHOK SIALANG CUT	PASIE RAJA	227.959.120
166	11.01.10.2011	SEUNEUBOK	PASIE RAJA	211.887.208
167	11.01.10.2012	IE MIRAH	PASIE RAJA	227.959.120
168	11.01.10.2013	PASIE RASIAN	PASIE RAJA	227.959.120
169	11.01.10.2014	UJUNG PADANG RASIAN	PASIE RAJA	227.959.120
170	11.01.10.2015	KRUENG KALEE	PASIE RAJA	227.959.120
171	11.01.10.2016	LHOK SIALANG RAYEUK	PASIE RAJA	227.959.120
172	11.01.10.2017	GAMPONG BARO	PASIE RAJA	227.959.120
173	11.01.10.2018	TEUPIN GAJAH	PASIE RAJA	234.559.120
174	11.01.10.2019	UJUNG PADANG ASAHAN	PASIE RAJA	234.559.120
175	11.01.10.2020	PULO IE II	PASIE RAJA	227.959.120
176	11.01.10.2021	PANTE RAJA	PASIE RAJA	227.959.120
177	11.01.11.2001	TENGAH PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	250.631.032
178	11.01.11.2002	PAYA PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	221.959.120
179	11.01.11.2003	PADANG PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	205.887.208
180	11.01.11.2004	AUR PEULUMAT	LABUHANHAJI TIMUR	205.887.208
181	11.01.11.2005	LIMAU SARING	LABUHANHAJI TIMUR	221.959.120
182	11.01.11.2006	BEUTONG	LABUHANHAJI TIMUR	221.959.120
183	11.01.11.2007	PEUNEULOP	LABUHANHAJI TIMUR	205.887.208
184	11.01.11.2008	GUNUNG ROTAN	LABUHANHAJI TIMUR	250.631.032
185	11.01.11.2009	KEUMUMU HILIR	LABUHANHAJI TIMUR	241.159.120
186	11.01.11.2010	KEUMUMU HULU	LABUHANHAJI TIMUR	227.959.120
187	11.01.11.2011	KEUMUMU SEBERANG	LABUHANHAJI TIMUR	234.559.120
188	11.01.11.2012	SAWANG INDAH	LABUHANHAJI TIMUR	227.959.120
189	11.01.12.2001	TUTONG	LABUHANHAJI BARAT	250.631.032
190	11.01.12.2002	TENGAH IBOH	LABUHANHAJI BARAT	228.559.120
191	11.01.12.2003	PEULOKAN	LABUHANHAJI BARAT	227.959.120
192	11.01.12.2004	KUTA IBOH	LABUHANHAJI BARAT	228.559.120
193	11.01.12.2005	UJUNG PADANG	LABUHANHAJI BARAT	228.559.120

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Alokasi Dana Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
194	11.01.12.2006	BLANG BARU	LABUHANHAJI BARAT	235.159.120
195	11.01.12.2007	BLANG POROH	LABUHANHAJI BARAT	257.231.032
196	11.01.12.2008	PULO IE	LABUHANHAJI BARAT	189.815.296
197	11.01.12.2009	SUAK LOKAN	LABUHANHAJI BARAT	250.631.032
198	11.01.12.2010	IKU LHUENG	LABUHANHAJI BARAT	227.959.120
199	11.01.12.2011	KUTA TRIENG	LABUHANHAJI BARAT	257.231.032
200	11.01.12.2012	PANTE GEULIMA	LABUHANHAJI BARAT	227.959.120
201	11.01.12.2013	PANTON PAWOH	LABUHANHAJI BARAT	234.559.120
202	11.01.12.2014	BATEE MEUCANANG	LABUHANHAJI BARAT	228.559.120
203	11.01.12.2015	PANTON RUBEEK	LABUHANHAJI BARAT	227.959.120
204	11.01.13.2001	KOTO	KLUET TENGAH	241.159.120
205	11.01.13.2002	ALUR KEUJRUN	KLUET TENGAH	227.959.120
206	11.01.13.2003	JAMBOR PAPAN	KLUET TENGAH	227.959.120
207	11.01.13.2004	MALAKA	KLUET TENGAH	227.959.120
208	11.01.13.2005	KOTO INDARUNG	KLUET TENGAH	227.959.120
209	11.01.13.2006	SIURAI-URAI	KLUET TENGAH	227.959.120
210	11.01.13.2007	KAMPUNG SAWAH	KLUET TENGAH	227.959.120
211	11.01.13.2008	KAMPUNG PADANG	KLUET TENGAH	227.959.120
212	11.01.13.2009	PULO AIR	KLUET TENGAH	227.959.120
213	11.01.13.2010	LAWE MELANG	KLUET TENGAH	227.959.120
214	11.01.13.2011	MERSAK	KLUET TENGAH	227.959.120
215	11.01.13.2014	SIMPANG DUA	KLUET TENGAH	227.959.120
216	11.01.13.2015	SIMPANG TIGA	KLUET TENGAH	227.959.120
217	11.01.14.2001	PAYA DAPUR	KLUET TIMUR	235.159.120
218	11.01.14.2002	SAPIK	KLUET TIMUR	234.559.120
219	11.01.14.2003	ALAI	KLUET TIMUR	227.959.120
220	11.01.14.2004	DURIAN KAWAN	KLUET TIMUR	251.231.032
221	11.01.14.2005	LAWE SAWAH	KLUET TIMUR	234.559.120
222	11.01.14.2006	LAWE BULUH DIDI	KLUET TIMUR	234.559.120
223	11.01.14.2007	PUCUK LEMBANG	KLUET TIMUR	228.559.120
224	11.01.14.2008	PAYA LABA	KLUET TIMUR	221.959.120
225	11.01.14.2009	LAWE CIMANOK	KLUET TIMUR	234.559.120
226	11.01.15.2001	SEUBADEH	BAKONGAN TIMUR	241.159.120
227	11.01.15.2002	LADANG RIMBA	BAKONGAN TIMUR	227.959.120
228	11.01.15.2003	UJONG PULO RAYEUK	BAKONGAN TIMUR	234.559.120
229	11.01.15.2004	SAWAH TINGKEUM	BAKONGAN TIMUR	227.959.120
230	11.01.15.2005	SIMPANG	BAKONGAN TIMUR	227.959.120
231	11.01.15.2006	UJONG PULO CUT	BAKONGAN TIMUR	211.887.208
232	11.01.15.2008	SEULEUKAT	BAKONGAN TIMUR	250.631.032
233	11.01.16.2005	PINTO RIMBA	TRUMON TIMUR	234.559.120
234	11.01.16.2006	KRUENG LUAS	TRUMON TIMUR	241.159.120
235	11.01.16.2007	JAMBO DALEM	TRUMON TIMUR	241.159.120
236	11.01.16.2008	KAPA SEUSAK	TRUMON TIMUR	219.087.208
237	11.01.16.2009	SEUNEUBOK PUNTO	TRUMON TIMUR	227.959.120
238	11.01.16.2010	SEUNEUBOK PUSAKA	TRUMON TIMUR	234.559.120
239	11.01.16.2011	ALUE BUJOK	TRUMON TIMUR	227.959.120
240	11.01.16.2012	TITI POBEN	TRUMON TIMUR	234.559.120
241	11.01.17.2001	BUKET GADENG	KOTA BAHAGIA	234.559.120
242	11.01.17.2002	RAMBONG	KOTA BAHAGIA	227.959.120
243	11.01.17.2003	SEUNEUBOK KEURANJI	KOTA BAHAGIA	205.887.208
244	11.01.17.2004	SEUNEUBOK ALUR BULOH	KOTA BAHAGIA	227.959.120

No	Kode Wilayah	Nama Gampong	Kecamatan	Pagu Alokasi Dana Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
245	11.01.17.2005	UJONG TANOH	KOTA BAHAGIA	227.959.120
246	11.01.17.2006	UJONG GUNONG CUT	KOTA BAHAGIA	205.887.208
247	11.01.17.2007	UJONG GUNONG RAYEUK	KOTA BAHAGIA	227.959.120
248	11.01.17.2008	BEUTONG	KOTA BAHAGIA	205.887.208
249	11.01.17.2009	JAMBO KEUPOK	KOTA BAHAGIA	234.559.120
250	11.01.17.2010	ALUR_DUAMAS	KOTA BAHAGIA	227.959.120
251	11.01.18.2001	LADANG RIMBA	TRUMON TENGAH	219.087.248
252	11.01.18.2002	GUNONG KAPHO	TRUMON TENGAH	211.887.208
253	11.01.18.2003	KAMPONG TEUNGOH	TRUMON TENGAH	189.815.312
254	11.01.18.2004	KRUENG BATEE	TRUMON TENGAH	227.959.120
255	11.01.18.2005	PULO PAYA	TRUMON TENGAH	227.959.120
256	11.01.18.2006	JAMBO PAPEUN	TRUMON TENGAH	227.959.120
257	11.01.18.2007	COT BAYU	TRUMON TENGAH	234.559.120
258	11.01.18.2008	NACA	TRUMON TENGAH	227.959.120
259	11.01.18.2009	IE JEUREUNEH	TRUMON TENGAH	227.959.120
260	11.01.18.2010	LHOK RAYA	TRUMON TENGAH	227.959.120
Total				59.305.597.600

BUPATI ACEH SELATAN,

MIRWAN MS